

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar penduduknya yang bekerja sebagai petani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah petani mencapai 44 persen dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 46,7 juta jiwa. Lebih dari separuhnya merupakan buruh tani dengan kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektar atau mencapai 38 juta keluarga tani (<http://www.spi.or.id/?p=915>).

Jika berpegang pada data BPS, istilah petani dapat menunjuk pada dua pengertian, yakni rumahtangga pertanian (sebagai kepala rumahtangga) dan tenaga kerja dalam sektor pertanian. Tenaga kerja dalam sektor pertanian bisa saja merupakan kepala rumahtangga pertanian atau anggota rumahtangganya sehingga jumlahnya bisa melebihi jumlah rumahtangga pertanian. Sementara itu, rumahtangga pertanian meliputi jenis-jenis rumahtangga yang dibedakan berdasar jenis kegiatan budidaya atau usaha pertanian yang dilaksanakan, baik menggunakan lahan maupun tidak. Kategorisasi semacam ini memungkinkan sebuah

rumahtangga pertanian dapat sekaligus termasuk lebih dari satu jenis rumahtangga, tergantung kegiatan budidaya yang dilaksanakan oleh rumahtangga bersangkutan. Selain itu masih terdapat jenis rumahtangga *petani gurem* yang didefinisikan sebagai rumahtangga pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.

Adanya berbagai pengertian tentang petani tersebut membuat penyebutan istilah petani tidak cukup diberikan begitu saja tanpa menjelaskan batasan pengertiannya. Terlepas dari mana yang lebih tepat, perbedaan dalam batasan pengertian yang digunakan dapat menimbulkan perbedaan data yang cukup besar dan dengan demikian mengaburkan konsep-konsep terkait yang dibangun berdasar batasan masing-masing ([http://www.bumitani.com/data\\_dan\\_fakta](http://www.bumitani.com/data_dan_fakta)).

Istilah apapun yang digunakan, cukup jelas secara umum bahwa pengertian petani menunjuk pada suatu lapisan atau golongan dalam masyarakat yang mencari dan memperoleh nafkah kehidupannya dari usaha pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat diperbarui (tanaman, hewan ternak, dan ikan/biota laut), baik sebagai usaha pokok satu-satunya maupun dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya. Merekalah yang secara historis mewarisi cara hidup sejak dari masa terdahulu dalam sejarah bangsa Indonesia dan tetap bertahan sampai kini.

Sebagai negara yang besar dalam jumlah penduduknya, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bergantung pada sektor pertanian dan berpengaruh besar terhadap komposisi jumlah penduduk dunia. Menurut Todaro (dalam <http://jurnalskripsi.com>) karakteristik umum negara-negara sedang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Tingkat hidup yang rendah.
2. Tingkat produktivitas yang rendah.
3. Pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi.
4. Tingkat pengangguran yang tinggi.
5. Ketergantungan yang tinggi terhadap produk pertanian dan produk-produk pokok (primer).
6. Dominasi ketergantungan dan sifat mudah terpengaruh (*vulnerable*) dalam hubungan internasional.

Jika melihat perkembangan dari sektor pertanian, sektor ini mengalami sedikit peningkatan, walaupun sektor ini sempat terlupakan sebagai sektor andalan dalam perekonomian negara Indonesia. Baru setelah badai krisis melanda Indonesia pada awal tahun 1997, terlihat jelas manfaat dari sektor pertanian ini. Banyak pendapat dan opini yang menyatakan bahwa sektor pertanian adalah penyelamat di tengah badai krisis. Sektor pertanian yang selama ini tidak mendapat prioritas ternyata mampu bertahan dan tidak terlalu terkena imbas krisis. Selama ini sektor pertanian memang kurang berkembang karena di Indonesia sektor pertanian masih bersifat *subsisten* (suatu sistem bertani dimana tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya saja), dan bukan bersifat komersial (mencari keuntungan). Akibatnya, meskipun bertani adalah mata pencaharian utama sebagian besar penduduk, tetapi belum dapat meningkatkan pendapatan petani dari masa ke masa. Selain itu, pendapatan dari buruh tani di Indonesia sendiri tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

**Tabel. 1 Upah Nominal dan Riil Buruh Tani di Indonesia (rupiah)  
Tahun 2009 s.d 2010**

Tahun	Bulan	Upah Buruh Tani (harian)	
		Nominal	Riil
2009	Januari	36 190	30 551
	Februari	36 392	30 438
	Maret	36 526	30 449
	April	36 632	30 633
	Mei	36 742	30 718
	Juni	36 827	30 680
	Juli	36 908	30 747
	Agustus	37 002	30 521
	September	37 065	30 292
	Oktober	37 105	30 115
	November	37 230	30 301
	Desember	37 305	30 233
2010	Januari	37 426	29 997
	Februari	37 637	29 987
	Maret	37 721	30 093
	April	37 844	30 138
	Mei	37 897	30 153
	Juni	37 946	29 980
	Juli	38 069	29 507
	Agustus	38 198	29 356
	September	38 301	29 315
	Oktober	38 382	29 354
	November	38 494	29 209
	Desember	38 577	28 934

*Sumber : Data Statistik 2010*

Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan, sedangkan Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh. Upah riil dihitung dari besarnya Upah Nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari data di atas, dapat dilihat sebenarnya upah Buruh Tani mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 yang semula Upah Nominalnya hanya Rp 36.190,- meningkat drastis di Tahun 2010 menjadi Rp 38.577,-. Sebenarnya hal ini

sudah menjadi signal yang positif bagi kemakmuran kehidupan para buruh tani pada umumnya.

Pembangunan pertanian sebagaimana telah dimaklumi bersama adalah merupakan bagian terpenting dari pembangunan ekonomi nasional. Pelaksanaannya yang dilakukan bertahap diharapkan akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Perkembangan sektor pertanian yang diharapkan lebih meningkat, tetapi justru cenderung statis dan tentu saja akan mempengaruhi laju perkembangan di sektor-sektor lain.

Salah satu sektor yang terpengaruh, antara lain sektor pendidikan. Pendidikan petani di Indonesia sendiri sebagian besar tidak lulus Sekolah Dasar. Menurut data statistik, dari jumlah seluruh petani di Indonesia, 75% tingkat pendidikannya tidak tamat dan tamat SD, 24% lulus SMP dan SMA, serta hanya 1% lulus Perguruan Tinggi (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/08/18/08402238/Sudahkah.Petani.Merdeka>).

Melihat kemajuan sektor pertanian yang cenderung statis dan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, tentu akan mempengaruhi sektor pendidikan pada anak dari keluarga petani tersebut. Kebutuhan pendidikan anak para keluarga petani akan mengalami keterhambatan. Pendidikan tidak bisa lepas dari persoalan dana. Dana dalam pendidikan tidak hanya mencakup dana SPP, tetapi juga mencakup ongkos/biaya untuk menuju ke tempat pendidikan dan biaya untuk masuk ke sekolah dan biaya untuk membeli buku-buku mata pelajaran. Memang untuk saat ini, dana SPP sudah digratiskan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Tetapi, ongkos/biaya untuk menuju ke tempat

pendidikan (sekolah), biaya untuk masuk/daftar ke sekolah dan biaya untuk membeli buku-buku mata pelajaran mereka harus tetap menanggungnya. Untuk masuk TK dan SD saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Untuk masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Hal-hal inilah masih memberatkan bagi keluarga petani untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan pendapatan dari keluarga petani ini tidak tentu. Mereka hanya mengandalkan dari hasil panen tanaman pertanian ataupun dari hasil buruh tani.

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat anak dari keluarga petani tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah ataupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sama halnya dengan situasi di Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, baik petani pemilik lahan maupun buruh tani. Masalah biaya pendidikan yang mahal menjadi alasan bagi mereka untuk tidak menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Rata-rata anak dari keluarga petani di kampung ini tidak bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang disebabkan karena keterbatasan dana sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya.

Besarnya biaya pendidikan tentu saja akan mempengaruhi angka partisipasi pendidikan. Angka partisipasi pendidikan di Provinsi Lampung bisa dikatakan rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, angka partisipasi pendidikan cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat pada data Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2006 s.d 2009**

<b>PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	97.77	97.9	98.26	98.53
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	84.14	84.99	85.10	85.92
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	49.47	50.02	50.69	50.44
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	7.26	8.71	9.06	8.97
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	111.55	110.84	109.54	109.09
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	80.83	84.70	85.84	82.74
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	51.55	54.90	53.16	60.62
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	93.94	94.04	94.28	94.79
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	66.65	68.47	68.94	69.17
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	39.87	40.72	41.05	41.43

*Sumber : Data Statistik 2009*

Angka partisipasi pendidikan dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

([http://www.bps.go.id/aboutus.php?id\\_subyek=28&tabel=1&fl=2](http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=28&tabel=1&fl=2))

Jika dilihat dari data di atas, angka partisipasi pendidikan di Provinsi Lampung ini akan semakin menurun jika tingkat pendidikannya semakin tinggi. Dari segi APS, yang semula dari umur 7-12 tahun sebesar 98.53 %, turun drastis pada usia 19-24 tahun yang hanya sebesar 8.97% (tahun 2009). Dari segi APK (tahun 2009), besar APK SD/MI 109.09%, turun drastis juga pada jenjang Sekolah Menengah (SM)/Madrasah Aliyyah (MA) yang hanya sebesar 60.62%, dan dari segi APM (tahun 2009), SD/MI sebesar 94.79% dan pada jenjang Sekolah Menengah (SM)/Madrasah Aliyyah (MA) hanya 41.43%.

Semakin berkembangnya sektor pertanian, diharapkan semakin meningkat pendapatan masyarakat, serta diharapkan dengan perkembangan tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat desa terutama petani (padi dan palawija). Pendapatan merupakan salah satu indikator ekonomi, dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat yang diikuti oleh membaiknya distribusi pendapatan antara sesama petani. Peningkatan pendapatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, dengan kata lain anak-anak dari keluarga petani mampu bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, hingga sampai Perguruan Tinggi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menentukan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Adakah korelasi antara tingkat pendapatan keluarga petani dengan tingkat pendidikan anaknya?
2. Berapa besar korelasi tingkat pendapatan keluarga petani terhadap tingkat pendidikan anaknya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan korelasi antara tingkat pendapatan keluarga petani dengan tingkat pendidikan anak.
2. Untuk mengetahui besar korelasi antara tingkat pendapatan keluarga petani dengan tingkat pendidikan anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### **a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

**b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran peneliti bagi semua pihak, khususnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar lebih memikirkan sektor pendidikan.